

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

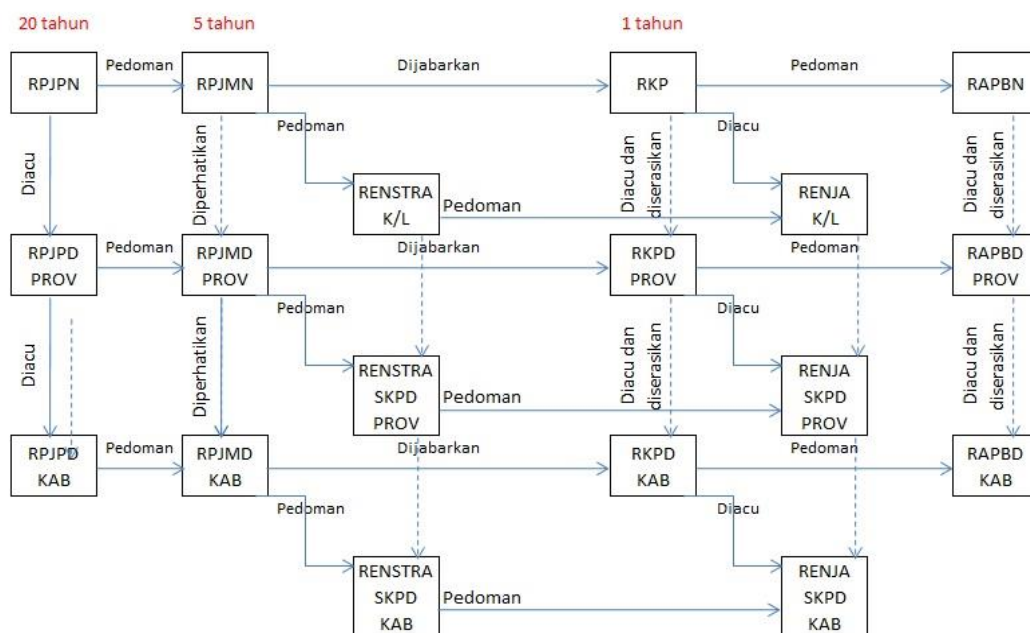
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten

Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;

- 2) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2020;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program, dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Sekretariat Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Sekretariat Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah);
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya penyederhanaan birokrasi;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah; dan
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat hasil Musrenbang/Aspirasi DPRD yang diampu di Bagian Kesra adalah sebagai berikut :

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	RAB & JUMLAH RP.	RENCANA HIBAH	KET
A	HIBAH SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH					
1	PEMBANGUNAN MUSHOLA AL ISTIQOMAH	DUSUN MRIYAN WETAN RT 003 RW 004 DESA KUNDISARI KEDU I	KEDU	338,324,395	75,000,000	
2	PEMBANGUNAN MADRASAH DINIYAH TARBIYATUL AULAD	DUSUN KRAJAN TIMUR DESA KARANGTEJO KEDU	KEDU	202,920,000	60,000,000	
3	MASJID DARUL JINAN	DUSUN GUNUNG KEKEP RT 001 RW 003 DESA NGLONDONG PARAKAN	PARAKAN	15,000,000	12,500,000	
4	MADIN FATKHUL MUBAROK	DUSUN KEBONSARI RT 02 RW 12 DESA PENDOWO KRANGGAN	KRANGGAN	225,000,000	75,000,000	
5	PONDOK PESANTREN KYAI PARAK BAMBU RUNCING	JL. COYUDAN NO 3 JL. COYUDAN 03 RT 01 RW 13 Dusun Coyudan, KELURAHAN PARAKAN KAUMAN PARAKAN	PARAKAN	726,418,016	500,000,000	
6	PEMBANGUNAN TPA/TPQ ROUDLOTUL JANNAH	DUSUN CANDISARI RT 02 RW 02 DESA BATURSARI CANDIROTO	CANDIROTO	60,000,000	40,000,000	
7	MI MA'ARIF BATURSARI	DUSUN GELARAN DESA BATURSARI CANDIROTO	CANDIROTO	95,000,000	50,000,000	
8	MI RIFA'IYAH PURWOSARI	DUSUN KARANGANYAR DESA PURWOSARI WONOBOYO	WONOBOYO	280,000,000	50,000,000	
9	MADRASAH DINIYAH RIFA'IYAH	DUSUN KARANGANYAR DESA PURWOSARI WONOBOYO	WONOBOYO	280,000,000	50,000,000	
10	MUSHOLA DARUL FALACH	DUSUN KARANGANYAR RT III RW VI DESA PURWOSARI WONOBOYO	WONOBOYO	280,000,000	50,000,000	
11	TPQ AL MUBAROK	DUSUN TROCOH RT 003 RW 004 DESA LEMPUYANG CANDIROTO	CANDIROTO	60,000,000	30,000,000	
12	PANITIA PEMBANGUNAN REHAB ATAP MASJID AL HIDAYAH	LINGKUNGAN WERU RW 003 KELURAHAN WALITELON SELATAN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	120,000,000	60,000,000	
13	MAJLIS TA'LIM BACA AL QUR'AN	BUTUH TR 003 RW 002 TANGGULANOM KECAMATAN SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	77,450,000	30,000,000	
14	MASJID MIFTAKHUL HUDA	DUSUN SAMIRANAN RT 07 RW 03 DES SAMIRANAN KECAMATAN KANDANGAN	KANDANGAN	170,000,000	100,000,000	
15	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID ROUDHOTUL MUTTAQIN	DUSUN NGAGLIK DESA MANDISARI KECAMATAN PARAKAN	PARAKAN	72,100,000	40,000,000	
16	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN	DUSUN TOMPAK RT 07 RW 03 DESA JETIS KECAMATAN SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	11,438,000	10,000,000	

17	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUSSALAM	DUSUN KARANG RT 1 RW 4 DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN	KRANGGAN	750,000,000	100,000,000	
18	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL AMANAH SMK Dr. SUTOMO TEMANGGUNG	SMK Dr. SUTOMO TEMANGGUNG JL. Dr. SUTOMO TEMANGGUNG NO 32 TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	650,000,000	100,000,000	
19	PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA HIDAYATUL MUTTAQIN	DUSUN CANGGAL RT 02 RW 01 DESA CANGGAL KECAMATAN KLEDUNG	KLEDUNG	100,000,000	90,000,000	
20	PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLA AN-NUR	DUSUN KARANG WETAN RT 03 RW 03 DESA MANDISARI KECAMATAN PARAKAN	PARAKAN	39,700,000	25,000,000	
21	TPQ AL-ISTIQOMAH	DUSUN LIMBANGAN RT 08 RW 04 DESA SALAMREJO KECAMATAN SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	150,000,000	75,000,000	
22	MUSHOLA AL HIKMAH	JAMPIREJO TENGAH RT 06 RW 02 KRLURAHAN JAMPIREJO KECAMATAN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	99,495,000	99,000,000	
23	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL JALAL	DUSUN NGABEYAN DESA NGUWET KECAMATAN KRANGGAN	KRANGGAN	163,790,000	60,000,000	
24	TPQ AL IKHLAS	DUSUN BOLANG RT 04 RW 2 DESA KLEPU , KEC KRANGGAN	KRANGGAN	19,786,000	19,000,000	
25	RA MASYITHOH I BATURSARI	GELARAN, BATURSARI, KECAMATAN CANDIRITO	CANDIROTO	40,000,000	20,000,000	
26	TPQ ITTIHADUL MU'MININ	DUSUN SEJURUK, DESA DESA NGAREN KEC NGADIREJO	NGADIREJO	25,000,000	15,000,000	
27	MI IBTIDAIYAH MA'ARIF	DESA PETUNG KEC BEJEN	BEJEN	22,250,000	20,000,000	
28	TK THOLABUDIN MANDISARI	DESA MANDISARI, KEC PARAKAN	PARAKAN	30,000,000	20,000,000	
29	TPQ HIDAYATUS SYIBYAN	DUSUN TANGGULANOM RT 03 RW 03, DESA TANGGULANOM, KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	61,289,000	30,000,000	
30	TPQ AL ISTIQOMAH	DUSUN TANGGULANOM RT 07 RW 03 DESA TANGGULANOM, KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	76,800,000	30,000,000	
31	TPQ DARUSSALAMAH	DUSUN SALAM TENGAH RT 04 RW 02 DESA SALAMREJO KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	15,000,000	12,500,000	
32	TPQ AZ ZAHRO	LINGKUNGAN PRAPAK RT 01 RW 02 KRANGGAN	KRANGGAN	15,000,000	12,500,000	
33	TPQ BAITUSSALAM	DUSUN BANYURIP, DESA NGLONDONG KEC PARAKAN	PARAKAN	30,600,000	17,500,000	
34	RA DARUSSALAM	DUSUN GUNUNG KEKEP DESA NGLONDONG KEC PARAKAN	PARAKAN	40,000,000	25,000,000	

35	MTS MA'ARIF PRINGSURAT	GILING RT 03 RW 06, DESA PINGIT KEC PRINGSURAT	PRINGSURAT	540,000,000	100,000,000	
36	MASJID DARUSSALAM	DUSUN GLONDONG DESA NGLONDONG KEC PARAKAN	PARAKAN	125,175,000	60,000,000	
37	MASJID BAITURROKHIM	DUSUN JIWAN RT 01 RW 06 DESA MEDARI, KEC NGADIREJO	NGADIREJO	45,250,000	30,000,000	
38	MASJID MIFTAKHUL HUDA	DUSUN SUMBERAN RT 01 RW 03 DESA PETIREJO KEC NGADIREJO	NGADIREJO	200,000,000	75,000,000	
39	MASJID JAMI AL-FALAH	DUSUN TEGALJOHO DESA BULU KEC BULU	BULU	92,835,000	70,000,000	
40	TPQ NURUL SAFA'AH	DUSUN KERENGAN, DESA KRAMAT KEC KRANGGAN	KRANGGAN	50,000,000	25,000,000	
41	MUSHOLA BAITUL MUTTAQIN	KELURAHAN BANYUURIP, KEC TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	31,500,000	25,000,000	
42	TPQ BAITUL MUQODDAS	DUSUN JAMBAAN DESA NGADITIRTO KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	151,373,000	50,000,000	
43	MAJELIS TA'LIM AL BANIN	DUSUN DIPOKERTEN RT 01 RW 02 DESA SELOPAMPANG KEC SELOPAMPANG	SELOPAMPANG	17,200,000	10,000,000	
44	MASJID AL HIDAYAH	LINGKUNGAN MARON RW 02 SIDOREJO TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	141,625,000	80,000,000	
45	TPQ DUSUN CARIKAN DESA GONDANGWINANGUN KECAMATAN NGADIREJO	DUSUN CARIKAN DESA GONDANGWINANGUN KECAMATAN NGADIREJO	NGADIREJO	75,000,000	50,000,000	
46	PONDOK PESANTREN DARUL HIKAM	DESA LUNGGE KECAMATAN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	141,075,000	70,000,000	
47	MASJID NURUL MUTAQIM	DUSUN SANGGEN DESA GANDUREJO KECAMATAN BULU	BULU	100,000,000	50,000,000	
48	MUSHOLA BAITUSYARIF	MANDANG RT 5 RW 3 DESA SUCEN KECAMATAN GEMAWANG	GEMAWANG	100,000,000	50,000,000	
49	TPQ NURUL ISTOQOMAH	DUSUN MALEBO KULON RT 04/ RW 03 DESA MALEBO KECAMATAN KANDANGAN	KANDANGAN	100,000,000	50,000,000	
50	MADIN SABILUL FALAH	DUSUN PAPRINGAN DESA KATEKAN KECAMATAN NGADIREJO	NGADIREJO	50,000,000	35,000,000	
51	MUSHOLLA AL IKHLAS	RT 03 RW 08 DUSUN TEGALPARAKAN DESA GEMAWANG KECAMATAN GEMAWANG	GEMAWANG	40,000,000	30,000,000	
52	TPQ DARUL MUTHOLIBIN	JL. Ngawen Km 1,6 DUSUN DRONO RT 01 RW 01 DESA DRONO KECAMATAN TEMBARAK	TEMBARAK	50,000,000	25,000,000	

	JUMLAH A			7,253,393,411	2,888,000,000	
B	HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN					
1	MUI	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	-	500,000,000	
2	BAZNAS	TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	-	200,000,000	
3	LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH (LPPD)	KABUPATEN TEMANGGUNG	TEMANGGUNG		100,000,000	
	JUMLAH B			-	800,000,000	
	JUMLAH A+B			7,253,393,411	3,688,000,000	

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum, dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
s.d Tahun 2020

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40102	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			100	1,450,115,000.00		353,288,600.00		279,000,000.00	163,949,500.00		37,908,600.00		15,386,500.00		49,312,000.00		0		162,535,200.00		99.1374		515,823,800.00		35.57	
		Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	100				75			100		100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	100				100			83.33		83.33		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	100				100			85.00		85.00		95		100		95		95		95		95		
401.02.001	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan	Terlaksananya fasilitas dan pembinaan Tertib Administrasi Kecamatan	Bulan	60	51,163,000.00	12	11,160,100.00	12	25,000,000.00	3,060,000.00	3	0	3	2,287,000.00	3	0	3	773,000	12	3,060,000.00	100.00	100	24	14,220,100.00	40.00	27.79	
401.02.002	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terselenggaranya Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan	13	158,846,000.00	2	38,452,700.00	3	20,000,000.00	6,770,500.00	1	2,645,500.00	1	604,500.00	0	3,226,000	1	285,000	3	6,761,000.00	100.00	99.8597	5	45,213,700.00	38.46	28.46	
401.02.003	Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersusunnya monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bulan	60	92,952,000.00	12	19,383,500.00	12	20,000,000.00	27,450,000.00	3	2,372,000.00	3	0	3	913,000	3	24,135,000	12	27,420,000.00	100.00	99.8907	3	46,803,500.00	4.53	50.35	
401.02.004	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya dokumen LPPD dan LKPJ Bupati	dokumen	14	450,354,000.00	2	83,476,300.00	2	80,000,000.00	76,569,000.00	2	28,590,100.00	0	9,010,000.00	0	35,065,000	0	2,698,100	2	75,363,200.00	100	98.4252	4	158,839,500.00	28.57	35.27	
401.02.005	Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan	Bulan	60	62,570,000.00	12	14,160,400.00	12	20,000,000.00	1,620,000.00	3	0	3	0	3	1,300,000	3	320,000	12	1,620,000.00	100.00	100	24	15,780,400.00	40.00	25.22	
401.02.006	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya fasilitas Kerjasama Daerah	Bulan	60	58,107,000.00	12	14,098,500.00	12	20,000,000.00	37,025,000.00	3	3,931,000.00	3	764,500.00	3	1,648,000	3	30,512,500	12	36,856,000.00	100.00	99.5436	24	50,954,500.00	40.00	87.69	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.02.007	Inventarisasi Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung	Terlaksananya fasilitasi dan inventarisasi pilar batas daerah	Bulan	60	119,910,000.00	12	35,863,100.00	12	23,000,000.00	1,580,000.00	3	0	3	980,000.00	3	600,000	3	0	12	1,580,000.00	100.00	100	24	37,443,100.00	40.00	31.23
401.02.008	Koordinasi Keamanan Daerah	Terwujudnya pengamanan daerah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	10	310,273,000.00	3	115,773,000.00	3	31,000,000.00	1,815,000.00	0	370,000.00	1	630,000.00	1	560,000	1	255,000	3	1,815,000.00	100	100	6	117,588,000.00	60.00	37.90
401.02.010	Identifikasi Rupabumi	Terwujudnya Pembakuan Rupabumi Bidang Pariwisata	Kegiatan	5	90,940,000.00	1	20,921,000.00	1	20,000,000.00	7,044,000.00	0	0	0	705,000.00	1	6,000,000	0	339,000	1	7,044,000.00	100	100	2	27,965,000.00	40.00	30.75
401.02.013	Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja	Terfasilitasinya Kunjungan Kerja dari Kabupaten/Kota lain	Bulan	60	55,000,000.00	12	0	12	20,000,000.00	1,016,000.00	3	0	3	405,500.00	3	0	3	610,500	12	1,016,000.00	100.00	100	24	1,016,000.00	40.00	1.85
JUMLAH					2,900,230,000	80	706,577,200	356	558,000,000	327,899,000	289	75,817,200	288	30,773,000	315	98,624,000	320	59,928,100	376	325,070,400	100.00	99.77	13.97	1,031,647,600	37.16	35.65
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																					100.00	99.14			37.16	35.57
PREDIKAT																					Sangat Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																					99.14				99.14	
PREDIKAT																					Akan Tercapai					

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40105	Program penyusunan dan penataan produk hukum			57.5	5,197,924,112		1,385,368,017	57.5	1,133,956,000	1,321,399,900		377,457,980		416,784,970		65,923,980		409,793,480		1,269,960,410		96.11		2,655,328,427		234.17	
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	30		28.57		30			0		0		14.29		16		16		53.33		16.00		53.33		
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100		86		100			74.07		83.33		84.91		59.78		59.78		59.78		59.78		59.78		59.78
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	83		100		83			100		100		100		100		100		100		100		100		100
		Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi	%	17		25		17			0		75		100		100		100		100		100		100		100
401.05.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah (perda dan Perbup)	jumlah produk hukum yang difasilitasi	238	478,978,112	100	66,219,385	48	115,000,000	40,000,000	27	18,964,000	10	0	16	3,448,000	39	6,975,000	92	29,387,000	100	73.47	192	95,606,385	80.67	19.96	
401.05.002	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi perundang-undangan	jumlah produk hukum yang disosialisasi	8	271,697,000	1	37,814,650	1	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,814,650	12.50	13.92	
401.05.004	Pengelolaan JDIH	Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan melalui JDIH	Bulan	60	406,440,000	12	65,487,130	12	50,000,000	30,299,900	3	4,109,980	3	7,429,970	3	11,299,980	3	7,419,980	12	30,259,910	100	99.87	24	95,747,040	40.00	23.56	
401.05.007	Pelayanan Bantuan hukum dalam dan diluar pengadilan	Tertanganinya sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	permasalahan	232	3,955,929,000	30	1,206,018,218	48	908,956,000	1,248,420,000	7	352,954,000	11	409,355,000	1	51,176,000	8	394,153,500	27	1,207,638,500	56.25	96.73	57	2,413,656,718	24.57	61.01	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.05.008	Rencana Aksi Nasional HAM	Tersedianya data RANHAM	dokumen	10	84,880,000	1	9,828,634	2	10,000,000	2,680,000	0	1,430,000	1	0	1	0	1	1,245,000	3	2,675,000	100	99.81	4	12,503,634	40.00	14.73
JUMLAH					5,197,924,112		1,385,368,017		1,133,956,000	1,321,399,900		377,457,980		416,784,970						1,269,960,410				2,655,328,427		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																					89.06			46.31		
PREDIKAT																					Tinggi					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																					78.28			78.28		
PREDIKAT																					Akan tercapai					

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (S/D Th2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Th. 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.00	15	16.00	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	16
A	Program penembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	90	12,895,788,250	58	3,158,691,166	84	2,645,000,000	1009738500	81.89	52,834,139	81.89	368,057,090	82.70		89.00		89.00	809,468,791	100	80.17	89	3,968,159,957	98.89	30.77	
1	Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji	kelancaran jamaah haji	orang	5	5,368,230,050	1	1,345,334,815	1	1,000,000,000	365,372,000	0.01	1,410,000	0.97	350,715,840	0.00	-	0	-	0.98	352,125,840	97.50	96.37	2	1,697,460,655	39.50	31.62	
2	Pelatihan guru TPQ dan Badko TPQ	terlithnya guru TPQ	kegiatan	5	438,638,000	1	34,626,250	0	80,000,000	0	-	-	-	-	0.00	-	0	-	0	0	0	0	1	34,626,250	20.00	7.89	
3	Pelatihan Managemant Masjid	terlatihnya pengurus masjid	orang	5	283,980,000	1	16,839,000	0	60,000,000	0	-	-	-	-	0.00	-	0	-	0	0	0	0	1	16,839,000	20.00	5.93	
4	Fasilitasi penyaluran bantuan sosial / hibah	terlaksananya bantuan hibah / sosial	kegiatan	5	675,140,000	1	51,098,459	1	150,000,000	161,953,400	0	889,539	0	2,160,250	0.60	40,214,749	0.40	60,232,052	1.00	103,496,590	100	63.91	2	154,595,049	40.06	22.90	
5	Penyelenggaraan MTQ	terselenggaranya MTQ	kegiatan	5	2,219,908,000	1	270,368,521	1	450,000,000	108,030,800	0.02	2,325,100	0	0	0.50	4,900,000	0.20	36,932,181	0.72	44,157,281	72.00	40.87	2	314,525,802	34.40	14.17	
6	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	terselenggaranya kegiatan keagamaan	kegiatan	5	2,803,871,000	1	385,713,631	1	600,000,000	362,610,000	0.40	43,587,500	0.10	15,181,000	0.25	94,306,500	0.25	147,902,580	1.00	300,977,580	100	83.00	2	686,691,211	40.00	24.49	
7	Fasilitasi AGPAI	terselenggaranya kegiatan AGPAI	Kegiatan	5	649,355,000	1	45,560,000	1	180,000,000	295,000	1	295,000	0	-	-	-	-	-	1	295,000	100	100	2	45,855,000	40.00	7.06	
8	Fasilitasi pensertipkatan tanah wakaf tempat ibadah dan sarpras tempat pendidikan	terbitnya sertipikat wakaf tempat ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	bidang	5	319,764,200	1	7,250,004	0	100,000,000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	7,250,004	20.00	2.27	
9	Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kegiatan	5	136,902,000	1	4,589,250	1	25,000,000	11,477,300	0.40	4,327,000	0	0	0.40	3,199,500		890,000	0.80	8,416,500	80.00	73	2	13,005,750	36.00	9.50	
Jumlah					12895788250	9	2161379930		2645000000	1009738500		1009738500		52834139		142620749		245956813	5	809468791		457	14	2970848721	290	126	0
																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	91.63	80.17	1.61		32.22	23.04	
																				Predikat	Sangat Tinggi						
																				Rata-rata Capaian Kinerja Program(%)	100				98.89		

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
40108	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	1,096,410,000.00		198,345,250	100	240,000,000	142,202,700	10.33	17,101,500	33.00	7,333,240	68.00	9,225,470	100	67,123,632	100	107,164,560.00	100	75.36	100	305,509,810.00	100	27.86			
401.08.002	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	Dokumen	5	378,570,000.00	1	57,497,900	1	80,000,000	72,117,400	0	0	0	0	0	0	1	45,393,400	1	43,535,600.00	100	60.37	2	101,033,500.00	40.00	26.69			
401.08.003	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan (R KPK)	Kegiatan	15	537,840,000.00	3	140,847,350	3	130,000,000	58,165,100	1	15,027,000	0	6,968,200	1	8,589,800	1	21,730,100	3	52,132,900.00	100	89.63	6	192,980,250.00	40.00	35.88			
		Verifikasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	Dokumen	1500		650		300			31		68		105		192		396		100	0	1,046		69.73				
401.08.005	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota, dan Dana Lainnya	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya	Laporan	145	180,000,000.00	29	0	29	30,000,000	11,920,200	7	2,074,500	7	365,040	7	635,670	8	132	29	11,496,060.00	100	96.44	58	11,496,060.00	85.00	6.39			
		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	Kegiatan	20		4		4			1		1		1		1		4		100	0	8		40.00	0			
JUMLAH					1,096,410,000		198,345,250		240,000,000	142,202,700		17,101,500		7,333,240		9,225,470		67,123,632		107,164,560.00				305,509,810					
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		100	75.36			54.95	27.86		
																				PREDIKAT		Sangat Tinggi							
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		100				100			
																				PREDIKAT		telah tercapai							

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2019		Target 2020			Realisasi per Triwulan Tahun 2020								Realisasi 2020		Capaian 2020		Realisasi s/d 2020		Capaian s/d 2020		Ket.	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=(8+21)	26	27	28								
1				100	4,917,027,000		475,129,546		1,430,000,000	831,101,200		52,091,500		16,436,000		86,164,478		472,076,074		154,691,978	83.33			629,821,524		12.81		
	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100		96		100				23.6		44.5		44.5		85.5		85.5		85.5		85.52		85.52		
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100		100		100				50		100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	100		60		100				20.00		20.00		20.00		40.00		40.00		40.00		40.00		40.00		
a	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah	Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	Kegiatan	15	1,051,881,600	3	26,224,170	3	260,000,000	13,245,600		1	988,000	1	412,500		4,355,000	1	1,110,999	3	6,866,499	100	51.84	6	33,090,669	40.00	3.15	
b	Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Terlaksananya kegiatan fasilitas Pembinaan dan Evaluasi BUMD	Kegiatan	30	1,243,766,000	6	114,122,400	6	275,000,000	83,936,700		1	26,459,000	1	5,986,000	1	3,381,100	3	36,298,198	6	72,124,298	100	85.93	12	186,246,698	40.00	14.97	
c	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	kegiatan	15	1,203,027,000	3	144,793,200	3	575,000,000	688,502,700		1	8,222,500	1	5,207,500		69,927,328	1	427,028,478	3	510,385,806	100	74.13	6	655,179,006	40.00	54.46	
d	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	kegiatan	15	1,226,202,000	3	43,354,200	3	320,000,000	45,416,200		1	16,422,000	0	4,830,000	1	8,501,050	1	7,638,399	3	37,391,449	100	82.33	6	80,745,649	40.00	6.59	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																				100				40.00				
Predikat																				Sangat Tinggi								
JUMLAH					4,917,027,000		475,129,546		1,430,000,000	831,101,200		52,091,500		16,436,000		86,164,478		472,076,074		626,768,052				955,262,022				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																				100				40.00				
PREDIKAT																				Sangat Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																				75.17				75.17				
PREDIKAT																				AT								

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		K E T		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
40120	Program Layanan Pengadaan				5,200,000, 000.00	100	409,291,454.0 0		1,300,000,000 .00	514,099,400.0 0		69,333,426.00		197,322.46 4.00		113,908.7 80.00		107,160.5 48.00		487,725.2 18.00		94.87		897,016.67 2.00		17.25			
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%	100		93.20		100			96.94		96.9		96.94		100		100		100		100.00		100.00				
		Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	%	100		100		100			4		5.74		66.07		100		100		100		100.00		100.00				
		Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan	%	100		100		100			6		7.09		63.54		100		100		100		100.00		100.00				
401.20.001	Pelaksanaan ULP dan LPSE (Tahun 2019)	- Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu - Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu - Presentase penggunaan E procurement terhadap belanja pengadaan	%	100		100	409,291,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,291,45 4					
401.20.002	Peningkatan kompetensi pelaku pengadaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Tahun 2020-2023)	Peningkatan kapasitas pelaku pengadaan PA, PPK PPHP, Pelaku Usaha	kegiata n	4	1,650,000, 000.00	0	0	1	350,000,000.0 0	83,278,000.00	0.32	26,832,000.00	0.05 5	4,590,000. 00	0.05	4,035,000. 00	0.57	40,555,00 0.00	1	76,012,00 0.00	100	91.28	1	76,012,000 .00	100	4.61			
		Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan	kegiata n	4		0		1			0		0		1		0		1		100		1		100				

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

		Fasilitasi Advokasi dan Manajemen Resiko Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	4		0		1		0		0		1		0		1		100		1		100				
401.20.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Tahun 2020-2023)	Fasilitasi Persiapan Pengadaan	bulan	48	1,600,000.000.00	0	-	12	350,000,000.00	233,980,000.00	3	27,950,957.00	3	50,059,094.00	3	85,082,801.00	3	57,566,048.00	12	220,658,900.00	100	94.31	12	220,658,900.00	100	13.79		
		Fasilitasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui Tender/Penunjukan Langsung	paket	480		0		56			5		1		31		19		56		100		56					
401.20.004	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukung	Pengadaan hardware dan sarana pendukung LPSE	paket	4	1,950,000.000.00	0	-	1	600,000,000.00	196,841,400.00	0	14,550,469.00	1	142,673.370.00	0	24,790,979.00	0	9,039,500.00	1	191,054.318.00	100	97.06	1	191,054,318.00	100	9.80		
				JUMLAH	5,200,000,000		409,291,454	1,300,000,000	514,099,400		69,333,426	197,322,464		113,908,780		107,160,548		487,725,218		100.00		897,016,672						
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH				100.00	94.87		100.00	17.25
																				PREDIKAT				Sangat Tinggi				
																				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH				100.00			100.00	
																				PREDIKAT				Tercapai				

KODE	BIDANG /PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
40111	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	%	74,50	2,218,289,900	58.70	398,523,950	57,40	667,446,100	167,828,169	28,26	42,389,569	58.69	54,842,000	58.69	9,386,200		117000900	58.69	219,533,669	100	130.81	100	609,630,419	100	27.48	
401.11.001	Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi	tersedianya dokumen perbup tugas dan fungsi perangkat daerah baru di lingkungan Pemkab temanggung	dokumen	2	39,650,000	1	17,586,000	1	25,000,000	9,417,500	0	2,300,000	0.07	0	0.50	954,000	0.43	6,137,500	1	9,391,500	100.00	99.72	2	26,977,500	100.00	68.04	
401.11.002	Penyusunan Peraturan Bupati tentang uraian tugas	tersedianya dokumen Perbup tentang uraian tugas pegawai di lingkungan Pemkab Temanggung	dokumen	1	22,000,000	0	-	1	25,000,000	3,122,000	0	3,122,000	0.07	0	0.60	-		0	0.67	3,122,000	67.00	100	0.67	3,122,000	67.00	14.19	
401.11.004	Analisis Jabatan PNS	Tersedianya dokumen analisis jabatan	dokumen	27	83,000,000	0	-	27	85,000,000	20,024,110	0	2,280,810	20.00	1,365,000	5.00	-		16340000	25.00	19,985,810	92.59	99.81	25.00	19,985,810	92.59	24.08	
401.11.009	Penyusunan Buku Standar Indeks Harga	tersedianya dokumen standar harga sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran dan Perbup tentang TPP	kegiatan	16	906,221,200	3	165,209,150	2	190,000,000	44,556,600	0	9,884,000	0.25	0	0.60	1,389,000	1.15	33,267,600	2	44,540,600	100	99.96	5	209,749,750	31.25	23.15	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.11.010	Pelatihan pelayanan prima	Terlaksananya kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima yang diharapkan terdapat perubahan mindset dan culture set dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	kegiatan	235	345,000,000	1	78,661,000	1	90,000,000	-	0	0	0	0	0	0	52,912,700	0	0	0	0	1.00	78,661,000	0	22.80
401.11.014	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	Tersedianya data laporan pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik	dokumen	5	267,600,000	1	47,397,000	1	65,000,000	5,470,700	0	1,890,000	0.15	0	0.50	-	3,418,100	0.65	5,308,100	65.00	97.03	1.65	52,705,100	33.00	19.70
401.11.020	Penyusunan LKJIP Bupati	tersedianya dokumen LKJIP setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan	dokumen	9	393,228,900	1	68,123,000	2	90,000,000	69,111,159	0	14,657,759	2	53,477,000	0	750,000	0	2	68,884,759	100	100	3.00	137,007,759	33.33	34.84
401.11.026	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	dokumen	5	100,000,000	48	10,167,000	19	79,446,100	14,446,100	0	7,415,000	10	9	6,293,200	52,912,700	19	66,620,900	100	461.17	67.00	76,787,900	100	76.79	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				78.07				57.20	
Predikat																				Tinggi					
40701	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibangan perangkat daerah			100.00	30,794,900		3,793,600	100	6,000,000	840,000	5.88	840,000.00	23.53		29.41	0	0.00	0.00			100	4,633,600.00		15.05	
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.	%	100		100	3,793,600	100	6,000,000		5.88		23.54			0									

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

407.01.066	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan setda	dokumen	26	30,794,900	26	3,793,600	33	6,000,000	840,000	7	840,000	10		8	-	8		33	840,000	100	100	59	4,633,600	100.00	15.05	
					2,218,289,900		398,523,950		667,446,100	167,828,169		42,389,569		54,842,000		9,386,200				218,693,669				609,630,419			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100							
Predikat																				Sangat Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																				89.04	130.31				57.20	27.482	
PREDIKAT																				Tinggi							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																				100					100		
PREDIKAT																				TT							

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020		KET		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
40113	Program penyelenggaraan kehumasan			75	31,177,701,998		6,287,727,191	75	6,170,000,000	4,055,726,510	136.19	501,965,432	119.6	1,003,103,800	2,057	-	0	0		3,817,192,289		94.12		10,104,919,480		32.41			
		Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	100				100			100		100		100		98.98		99		98.98		99		98.98				
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	25				25			-75		-41		8		26		26		100		26		100				
		Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	100				100			81.05		90.38		99.44		97.36		97.4		97.36		97.36		100				
401.13.002	Pengelolaan Website Kabupaten Temanggung	Tersedianya informasi kegiatan pemkab melalui website Temanggung (berita, pengumuman, sms gateway, e-kliping berita temanggung, data)	publikasi	10834	662,109,800	6,064.00	31,280,750	2184	100,000,000	20,000,000	658	1,776,250	417	4,340,500	597	1,875,000	520	6,957,500	2,192	14,949,250	100	74.75	8,256	46,230,000	76.20	6.98			
401.13.004	Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa bagi Masyarakat	terlaksananya publikasi informasi melalui media (poster, baliho, papan baliho, dan koran)	publikasi	177	1,355,000,000	39.00	211,059,900	35	400,000,000	237,780,000	4	49,000,000	9	107,935,000	8	31,720,000	22	48,070,000	43	236,725,000	100	99.56	82	447,784,900	46.33	33.05			
401.13.005	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi kegiatan pemkab melalui media massa press release, berita media massa dan kerjasama dengan wartawan	publikasi	2633	1,305,000,000	500.00	215,723,000	525	220,000,000	304,727,200	99	18,632,000	45	39,870,000	190	15,935,000	266	228,222,510	600	302,659,510	100	99.32	1,100	518,382,510	41.78	39.72			
401.13.007	Penyelenggaraan Kehumasan	Terdokumentasinya kegiatan pemkab Temanggung melalui Foto (gambar) dan Video	kegiatan	4900	1,631,500,000	905.00	258,827,123	900	500,000,000	81,316,000	77	13,635,925	280	10,499,068	355	15,432,842	318	38,757,591	1,030	78,325,426	100	96.32	1,935	337,152,549	39.49	20.67			
401.13.008	Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	Terwujudnya buku dan video profil Kabupaten Temanggung	media	10	419,195,200	2.00	72,605,650	2	75,000,000	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	2	72,605,650	20.00	17.32	refo kusi ng covi d 19		

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

401.13.009	Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung	Tersebar nya informasi pembangunan Pemkab Temanggung melalui Temanggung TV	progr am siar	900 0	23,686,798,99 8	1,80 0.00	5,198,258, 245	180 0	4,000,000,000	2,999,374,100	450	309,580,183	450	742,668,968	450	306,967,5 89	450	1,433,223, 420	1,80 0	2,792,440,160	100	93.1 0	3,60 0	7,990,698,405	40.0 0	33.7 3
401.13.010	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM	Tersebar nya informasi pembangunan Pemkab melalui Radio Temanggung	progr am siar	900 0	1,673,098,000	1,80 0.00	256,608,59 2	180 0	750,000,000	350,033,148	450	100,660,322	450	88,690,728	450	75,123,39 3	450	67,159,500	1,80 0	331,633,943	100	94.7 4	3,60 0	588,242,535	40.0 0	35.1 6
401.13.011	Pemeliharaan dan Operasional Videotron	Terselenggaranya informasi melalui Videotron	video (tayan gan)	455	445,000,000	221. 00	43,363,931	70	125,000,000	62,496,062	11	8,680,752	16	9,099,536	7	9,843,070	29	32,835,642	63	60,459,000	90.00	96.7 4	284	103,822,931	62.4 2	23.3 3
JU MLAH					31,177,701,99 8		6,287,727, 191		6,170,000,000	4,055,726,510		501,965,432		1,003,103,800		456,896,8 94		1,855,226, 163		3,817,192,289				10,104,919,48 0		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																				98.57	94.1 2		49.4 6	32.4 1		
PREDIKAT																				Sangat Tinggi						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																				98.78			99.6 6			
PREDIKAT																				Tercapai						

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2019		TARGET 2020			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2020		CAPAIAN 2020		REALISASI s/d 2020		CAPAIAN s/d 2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.00	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40110	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah	%	100	13,597,749,775		2,264,694,852	100	2,785,000,000	1,490,571,450	100	0	100	69,088,000	100	315,140,200		725,590,765	100	1,109,818,965	100	74.46	100	3,374,513,817	100	24.82
401.10.01	Kepesertaan Apkasi	Tersedianya Dana Apkasi	Bulan	60	175,000,000	12	25,000,000	12	35,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	-	12	25,000,000	12	25,000,000	100	100	24	50,000,000	40	28.57
401.10.02	Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/L PND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/L PND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Bulan	60	13,422,749,775	12	2,239,694,852	12	2,750,000,000	1,465,571,450	3	0	3	69,088,000	3	315,140,200	3	700,590,765	12	1,084,818,965	100	74.02	24	3,324,513,817	40	24.77
Rata-rata capaian kinerja kegiatan																				100		24.00		40		
																				Predikat	Sangat Tinggi					
40702	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	63,811,799,100		11,869,419,132	100	11,625,000,000	8,715,638,748	100	1,418,528,891	100	1,304,393,124	100	1,970,463,964	100	2,380,952,587	100	7,074,338,566	100	81.17	100	18,943,757,698	100	29.69
407.02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan rekening listrik telepon dan air	Bulan	60	7,180,920,000	12	966,855,772	12	1,400,000,000	999,996,000	3	230,946,234	3	219,620,461	3	239,587,072	3	233,902,740	12	924,056,507	100	92.41	24	1,890,912,279	30	26.33
407.02.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan bahan pembersih dan terbayarnya jasa kebersihan kantor	Bulan	60	7,175,990,500	12	1,071,505,687	12	1,400,000,000	1,207,452,648	3	187,837,941	3	217,463,303	3	221,684,330	3	226,332,780	12	853,318,354	100	70.67	24	1,924,824,041	30	26.82
407.02.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	60	1,099,999,500	12	158,189,200	12	220,000,000	123,997,500	3	21,641,000	3	14,774,000	3	24,572,600	3	61,289,000	12	122,276,600	100	98.61	24	280,465,800	30	25.50

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

407.02.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	Bulan	60	1,194,999,100	12	172,983,500	12	250,000,000	250,000,000	3	17,441,500	3	49,825,000	3	55,831,750	3	108,865,250	12	231,963,500	100	92.79	24	404,947,000	30	33.89
407.02.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik dan elektronika	Bulan	60	949,999,500	12	146,229,000	12	200,000,000	169,973,800	3	25,510,000	3	21,785,000	3	34,840,000	3	69,588,000	12	151,723,000	100	89.26	24	297,952,000	30	31.36
407.02.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa suara merdeka, kedaulatan rakyat, wawasan, magelang ekspres, tempo, gatra, jawa pos, media Indonesia, minggu pagi, merapi online dan kompas dan referensi perundang-undangan dan peraturan lainnya	Bulan	60	842,942,000	12	84,286,455	12	175,000,000	144,254,800	3	11,011,500	3	19,739,000	3	24,460,500	3	17,999,500	12	73,210,500	100	50.75	24	157,496,955	30	18.68
407.02.017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat, tamu, rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	Bulan	60	12,200,000,00	12	1,944,064,739	12	2,650,000,000	1,894,500,000	3	367,818,925	3	295,835,110	3	428,501,850	3	646,046,705	12	1,738,202,590	100	91.75	24	3,682,267,329	30	30.18
407.02.018	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat	Bulan	60	14,499,961,000	12	1,761,125,550	12	3,000,000,000	1,699,839,000	3	203,250,429	3	30,131,500	3	462,056,111	3	537,945,088	12	1,233,383,128	100	72.56	24	2,994,508,678	30	20.65
407.02.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tercukupinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi antar instansi/OPD	Bulan	60	289,995,000	12	33,150,000	12	50,000,000	99,960,000	3	7,105,000	3	13,780,000	3	13,555,000	3	20,110,000	12	54,550,000	100	54.57	24	87,700,000	30	30.24
407.02.020	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Terbayarnya honor tenaga honorer penjaga repetar, dan petugas kebersihan rumah dinas dan pembantu rumah dinas	Bulan	60	6,156,992,700	12	860,190,215	12	1,220,000,000	1,318,545,000	3	225,751,606	3	237,936,706	3	279,768,737	3	273,247,804	12	1,016,704,853	100	77.11	24	1,876,895,068	30	30.48
407.02.021	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Bulan	60	9,519,999,800	12	4,670,839,014	12	1,060,000,000	807,120,000	3	120,214,756	3	183,503,044	3	185,606,014	3	185,625,720	12	674,949,534	100	83.62	24	5,345,788,548	30	56.15
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	79.46	24.00		30	30.03	

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

40703	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	%	100	38,803,877,575	2,383,079,683	100	5,920,000,000	4,159,776,870	100	154,920,282	100	205,593,178	100	770,879,156	2,567,912,198	100	3,699,304,814	100	88.93	100	6,082,384,497	100	15.67	
407.03.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai	paket	5	2,099,977,700	353,894,192	1	550,000,000	328,935,900	0	0	0	0	1	30,633,200	0	287,173,675	1	317,806,875	100	96.62	2	671,701,067	20	31.99
407.03.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	paket	5	1,750,000,000	181,296,000	1	575,000,000	418,635,200	0	0	0	0	1	74,616,000	0	316,609,201	1	391,225,201	100	0	2	572,521,201	20	32.72
407.03.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhiya kebutuhan peralatan gedung kantor	paket	5	1,799,999,900	146,175,800	1	275,000,000	190,257,600	0	0	0	0	0	2,850,000	1	181,533,000	1	184,383,000	100	96.91	2	330,558,800	20	18.36
407.03.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terlaksananya perbaikan rumah dinas	Bulan	60	3,274,995,125	353,115,850	12	2,000,000,000	1,125,132,320	3	785,000	3	5,725,000	3	146,481,000	3	820,252,679	12	973,243,679	100	86.50	24	1,326,359,529	30	40.50
407.03.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	60	2,499,987,550	288,197,770	12	1,000,000,000	949,997,250	3	335,000	3	13,678,000	3	200,761,600	3	611,259,480	12	826,034,080	100	86.95	24	1,114,231,850	30	44.57
407.03.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa service untuk kendaraan dinas, penggantian suku cadang, tersedianya BBM, gas, dan pelumas, KIR dan STNK	Bulan	60	6,749,999,900	842,582,721	12	1,200,000,000	918,605,300	3	143,265,282	3	132,704,078	3	254,193,356	3	284,793,663	12	814,956,379	100	88.72	24	1,657,539,100	30	24.56
407.03.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Bulan	60	1,094,997,400	169,697,500	12	120,000,000	110,050,000	3	5,625,000	3	42,637,500	3	44,874,000	3	16,610,000	12	109,746,500	100	99.72	24	279,444,000	30	25.52
407.03.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhiya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan komputer, lcd, mesin ketik, alat musik	Bulan	60	1,099,990,000	48,119,850	12	200,000,000	118,163,300	3	4,910,000	3	10,848,600	3	16,470,000	3	49,680,500	12	81,909,100	100	69.32	24	130,028,950	30	11.82
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100		24		30		
																		Predikat	Sangat Tinggi						

RENJA 2022 | (SEKRETARIAT DAERAH)

40704	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya	%	100	1,587,730,000		117,506,000	100	350,000,000	242,616,000	100	9,395,000	100	870,000	100	39,340,000	100	115,545,000	100	165,150,000	100	68.07	100	282,656,000	100	17.80
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Bupati, Wabup, Sekda, Pejabat Eselon, dan staf	paket	5	1,587,730,000	1	117,506,000	1	350,000,000	242,616,000	0	9,395,000	0	870,000	0	39,340,000	1	115,545,000	1	165,150,000	100	68.07	2	282,656,000	40	17.80
																				Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100		2		40	
																				Predikat	Sangat Tinggi					
	Jumlah				117,801,156,450	0.00	16,634,699,667	400.00	20,680,000,000	14,608,603,068	400.00	1,582,844,173	400.00	1,579,944,302	400.00	3,095,823,320	200	5,790,000,550	400.00	12,048,612,345				28,683,312,012	400	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
 - b. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
 - c. Cakupan kecamatan tertib administrasi
 - d. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
 - e. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
 - f. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
 - g. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
 - h. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
 - i. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP
 - j. Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
 - b. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
 - c. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
 - d. Indeks reformasi Birokrasi
 - e. Persentase peningkatan pengunjung website
3. Realisasi kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
 - b. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

- c. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
- d. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
- e. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
- f. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
- g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- h. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- i. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
- j. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
- k. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **89,94**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Capaian Kinerja	: 95.71%	kategori	Baik
-----------------	----------	----------	------
2. Cakupan pilar batas yang terinventarisir

Capaian Kinerja	: 100%	kategori	Baik
-----------------	--------	----------	------
3. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu

Capaian Kinerja	: 100%	kategori	Baik
-----------------	--------	----------	------
4. Cakupan kecamatan tertib administrasi

Capaian Kinerja	: 100%	kategori	Baik
-----------------	--------	----------	------
5. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Capaian Kinerja	: 53.33%	kategori	Baik
-----------------	----------	----------	------
6. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Capaian Kinerja	: 59.8%	kategori	Cukup
-----------------	---------	----------	-------

7. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
8. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
9. Persentase rumah ibadah dan sarpras kendidikan keagamaan kondisi baik
Capaian Kinerja : 98.89% kategori Baik
10. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
Capaian Kinerja : 85.52% kategori Cukup
11. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
12. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
Capaian Kinerja : 40% kategori Cukup
13. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
14. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
15. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
Capaian Kinerja : 96.94% kategori Cukup
16. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan
Capaian Kinerja : 30.07% kategori Kurang
17. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
18. Indeks reformasi Birokrasi
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
19. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Capaian Kinerja : 97.03% kategori Cukup
20. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
21. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP
Capaian Kinerja : 60.16% kategori Baik

22. Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Capaian Kinerja : 31.82% kategori Cukup
23. Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah
Capaian Kinerja : 100% kategori Baik
24. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
Capaian Kinerja : 98.98% kategori Cukup
25. Persentase peningkatan pengunjung website
Capaian Kinerja : 30.93% kategori Baik
26. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
Capaian Kinerja : 97.36% kategori Cukup

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini, semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BAGIAN PEMERINTAHAN																			
A	FUNGSI PENUNJANG : SEKRETARIAT DAERAH																		
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	angka	3.35	3.3	3.35	3.40	3.45	3.50	3.35	3.35				95.71		AT		
1	Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	%	62.74	75	75	100	100	100	100	100				100	TT			
			Jumlah pilar batas yang terinventarisir									3	3						
			Jumlah total pilar batas sesuai Permendagri									4	4						
		Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	%	93.33	100	100	100	100	100	100	83.33	100				100	TT		
			Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu									5	5						
			Jumlah Perangkat Daerah pengampu SPM									6	6						
		Cakupan kecamatan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	100	100	90	100				100	TT		
Jumlah kecamatan tertib administrasi									18	19									
Jumlah keseluruhan kecamatan									20	20									
BAGIAN HUKUM																			
A	Bidang : Administrasi Pemerintahan																		

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
INDIKATOR PROGRAM																			
1	Program Penyusunan dan Penataan Produk Hukum	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	%	33	30	30	30	30	30	28.6	16				53.33	TT			
			<i>Jumlah Peraturan Bupati yang menindaklanjuti Peraturan Daerah</i>									4	4						
			<i>Jumlah total Peraturan Daerah</i>									14	25						
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	68	20	100	100	100	100	86	59.8					59.8		AT	
			<i>Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH</i>									86	55						
			<i>Jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati</i>									100	92						
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	%	83	24	83	83	83	83	100	100					100	TT		
			<i>Jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi</i>									29	23						
			<i>Jumlah permasalahan non litigasi</i>									29	23						
		Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	%	17	7	17	17	17	17	25	100					100	TT		
			<i>Jumlah permasalahan yang ditangani secara litigasi</i>									1	4						
			<i>Jumlah total permasalahan litigasi</i>									4	4						
BAGIAN KESRA 1	Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental	Persentase rumah ibadah dan sarpras kendidikan keagamaan kondisi baik	%	80	82	84	86	88	90	83	89				98.89	TT			
			<i>Jumlah rumah ibadah kondisi baik</i>									5476	5162						
			<i>Jumlah rumah ibadah dan sarpras keagamaan</i>									6598	5800						

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
BAGIAN PEREKONOMIAN																			
	BIDANG : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan																		
1	Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%		100	100	100	100	100	95.95	85.52				85.52		AT		
<i>Jumlah realisasi barang subsidi yang beredar</i>										4	4								
<i>Target barang subsidi yang beredar</i>										4	4								
Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi			%		100	100	100	100	100	100	100				100	TT			
<i>Jumlah laporan permasalahan barang subsidi yang terselesaikan</i>										5	4								
<i>Target laporan permasalahan barang subsidi yang terselesaikan</i>										5	4								
Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			%		100	100	100	100	100	60	40				40		AT		
<i>Jumlah BUMD dengan opini WTP</i>										3	2								
<i>Jumlah BUMD yang ada</i>										5	5								
BAGIAN PEMBANGUNAN																			
	BIDANG : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan																		
1	Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT			
Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan										650	396								
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan										650	396								
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA																			
1			%		100	100	100	100	100	100	100				100	TT			

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Program Layanan Pengadaan	Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu	<i>Jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan</i>					153	56											
			<i>Jumlah keseluruhan paket pekerjaan yang ada di SIRUP melalui tender</i>					153	56											
		Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu	%		100	100	100	100	100	93.20	96.94					96.94		AT		
			<i>Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu</i>					96	95											
			<i>jumlah keseluruhan perangkat daerah</i>					103	98											
		Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan	%		80	100	100	100	100	33.89	30.07					30.07			UK	
			<i>Jumlah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan lewat e proc</i>					484	356											
			<i>Jumlah pengadaan barang jasa</i>					1428	1184											
		BAGIAN UMUM																		
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100				100	TT				
			<i>Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi</i>					1057	635											
			<i>Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah</i>					1057	635											
BAGIAN ORTALA																				
BIDANG : Administrasi Pemerintahan																				
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks reformasi Birokrasi	angka	72.34	62	64	66	68	70	62.76	67				100	TT				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	75	84	85	86	87	89	79.95	65				97.03		AT			
	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	nilai	CC	B	B	B	BB	BB	B	B				100	TT				

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKJIP	%	100	53.2	57.4	63.8	70.2	74.5	58.70	60.16				60.16	TT			
			Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat B							27	27								
			Jumlah seluruh Perangkat Daerah							46	46								
		Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	0	21.8	30.9	40	49.1	58.2	18.52					31.82		AT		
			Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM							5									
			Jumlah Perangkat Daerah							27									
	Program perencanaan, evaluasi, dan kelibngan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100					100	TT			
BAGIAN HUMAS																			
A	Bidang : Fungsi penunjang lainnya bidang Administrasi Pemerintahan humas																		
1	Program penyelenggaraan kehumasan	Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	98.98				98.98		AT		
		Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti								300	292								

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2020 (%)	STATUS			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang masuk					300	295								
		Persentase peningkatan pengunjung website	%	25	25	25	25	25	25	85.17 0206 04	26				30.93	TT			
		Selisih dengan tahun sebelumnya								64,65 1	81.68 2								
		Jumlah Pengunjung tahun sebelumnya								75,90 8	64.65 1								
		Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi	%	100	100	100	100	100	100	97.84	97.36				97.36		AT		
		Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan								905	921								
		Jumlah kegiatan Pemkab								925	946								
		JUMLAH INDIKATOR SASARAN	4	RATA RATA CAPAIAN SASARAN											98.93	17	8	1	
		JUMLAH INDIKATOR PROGRAM	22	RATA RATA CAPAIAN PROGRAM											80.95				
		JUMLAH IKPD	26	RATA RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH											89.94				

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 14 terdiri dari:
 - a. Cakupan pilar batas yang terinventarisir
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Data pilar batas telah tercukupi, Bantuan dari Pemda yang berbatasan dlm Kgt.Inventarisasi pilar batas
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan anggaran yang tersedia,Batas hilang terbawa arus sungai,lokasi sulit dijangkau,pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pengecekan Pilar Batas dan koordinasi dengan Kab.Kendal
 - b. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah yang mengampu SPM
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPM,data yang kurang lengkap
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi secara lisan dan tertulis dengan perangkat daerah pengampu SPM
 - c. Cakupan kecamatan tertib administrasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Telah diamanahkan dalam PP No.17 Tahun 2018
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan,kurang lengkapnya data
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kordinasi secara lisan dan tertulis dengan Kecamatan
 - d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan

- anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan kelua
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- e. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Temanggung dan diharapkan juga adanya peran aktif juga dari Pemkab Temanggung untuk sesegera mungkin menindaklanjuti terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat
- f. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada Refokusing anggaran kegiatan, kurangnya jumlah Pegawai
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah tetap direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan yang sudah

ada agar terjadi kesinambungan dalam rangka mencapai target 5 tahun di RENSTRA

- g. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kerjasama yang baik antar OPD pengampu dan bagian perekonomian sehingga setiap ada aduan bisa segera diselesaikan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kebanyakan aduan yang muncul tidak tertulis
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menghimbau kepada masyarakat agar setiap aduan untuk dilengkapi dengan aduan tertulis
- h. Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu
- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Koordinasi rutin antara pihak terkait yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima kegiatan, Perencanaan kegiatan dilakukan secara matang dan lebih awal, Proses pemilihan penyedia sesuai jadwal yang ditetapkan, Pelaksanaan pekerjaan sesuai time schedule dan didukung oleh manajemen personil yang cukup, Pengendalian pelaksanaan pekerjaan melalui mitigasi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan khususnya terhadap pekerjaan yang dimungkinkan mengalami keterlambatan.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada Refokusing anggaran kegiatan semua SKPD untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, Pergantian personil pengelola pengadaan barang/jasa akibat dari mutasi dan purna tugas menghambat percepatan pelaksanaan kegiatan, Perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang matang, Regulasi untuk pengelolaan kegiatan yang terbit tidak pada awal tahun.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mutasi personil diharapkan pada awal tahun anggaran, Regulasi pengelolaan kegiatan diterbitkan awal tahun,

Perencanaan kegiatan agar lebih diperhitungkan dengan matang.

- i. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah embuat surat edaran Sekda Nomor : 050/000731 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan.
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembatalan paket tender karena rasionalisasi untuk penanganan COVID 19
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat edaran Sekda Nomor: P/050/000662/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sirup untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa yang masih ada dan Penyesuaian Target Kinerja akibat refocussing anggaran
- j. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Keinginan untuk senantiasa memberikan pelayanan Kedinasan terbaik kepada Kepala Daerah berupa terlaksananya penerimaan kunker Pejabat dengan baik, terselenggaranya peringatan hari besar, nasional dan daerah, serta terpenuhinya iuran Apkasi beserta kegiatannya
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya wabah covid 19 yang mengakibatkan pembatasan kegiatan dan kurang optimalnya koordinasi penyelenggara kegiatan
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melaksanakan Kegiatan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Dep/ LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional & Daerah dan Kegiatan Kepesertaan Apkasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Serta memperbaiki koordinasi antar penyelenggara kegiatan
- k. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah aplikasi yang sudah terintegrasikan antara e planing e budgeting, dan e monev, Review dari inspektorat ditindaklanjuti oleh PD,

membuka klinik penyusunan LKJIP

- Faktor penghambat indikator tersebut adalah E- Sakip belum terintegrasi, PK belum terintegrasi dengan SKP, belum adanya tim verifikasi LKjiP PD
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlu integrasi aplikasi antar e planning, e bugeting, dan e monev yang disesuaikan dengan perubahan Permen 90 tahun 2019
1. Indeks reformasi Birokrasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Ketepatan waku Tim Kab dalam mengisi dan mengaplod LKE
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Peralihan kegiatan PMPRB dari Inspektorat ke Ortala perlu waktu transfer pengetahuan, Pemahaman PD terhadap PMPRB kurang maksimal karena peralihan kasubag, perencanaan ke Kasubag Umum kepegawaian, Aplikasi PMPRB dari Kemenpan yang sulit di akses
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Memberikan sosialisasi dan proses pendampingan dari Kemenpan RB
 - m. Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) / Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
 - n. Persentase penyelesaian dokumen, evaluasi, data pokok dan pelaporan Perangkat Daerah
 - o. Persentase peningkatan pengunjung website
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Konten website harus selalu update dan mengikuti perkembangan jaman sehingga pengunjung antusias untuk masuk mencari informasi ke website
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah pengunjung website banyak beralih ke media sosial
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah konten website harus dibuat sekreatif dan se up to date mungkin, dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak ditinggalkan oleh pengunjung. Konten yang

disajikan dari informasi, data, foto dan berita harus selalu baru dan terkini.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 11 terdiri dari:
 - a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tertibnya administrasi di Bagian Pemerintahan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Keterbatasan anggaran dan SDM yang tersedia, capaian kinerja dari OPD belum maksimal
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BKPSDM
 - b. Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Seharusnya Perangkat Daerah pengusul Perda pro aktif dalam mengusulkan Perbup sesuai kebutuhan yang diamanatkan dalam Perda
 - c. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen yang tinggi dari pegawai dan monitoring dari pimpinan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Seharusnya Perangkat Daerah yang mengusulkan Perda dan Perbup harus tertib administrasi dengan secepatnya

menyampaikan dokumen Perda dan Perbup yang sudah diundangkan ke Bagian Hukum untuk diinput di JDIH

- d. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Target quota barang bersubdi selalu terpenuhi, kerjasama yang solid antar OPD pengampu
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Ada beberapa kios pupuk bersubsidi yang belum menerapkan sistem kartu tani, HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan beberapa kelompok tani yang belum masuk RDKK
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Monev dan sosialisasi penggunaan kartu tani ke kios-kios pupuk bersubsidi lebih diintensifkan, Diusulkan ke PPL pertanian bagi kelompok tani yang belum masuk RDKK, serta monev dan sosialisasi ke pangkalan LPG untuk menghimbau dan memberikan teguran terhadap HET yang belum sesuai
- e. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya komitmen direksi dan jajaran pegawai BUMD untuk memperbaiki kinerja mereka
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Kurangnya pengawasan dan pengendalian BUMD serta tidak adanya atau belum terisinya kelas jabatan pengevaluasi BUMD di bagian perekonomian
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan kerjasama dengan Dewan Pengawas untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD
- f. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desk penginputan SIRUP untuk OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas pada awal tahun
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum semua OPD melakukan identifikasi dan membuat rencana

pengadaan pada awal tahun

- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Desk dan Pendampingan

g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Penerapan pelayan online, mempermudah akses, pemanfaatan teknologi informasi
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah SDM pelayanan yang masih standar, Beberapa PD tidak mengumpulkan data
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Diklat/ Bintek pelayanan prima, Surat teguran kepada PD

h. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Aplikasi yang sudah terintegrasi antara e- planing, e-budgeting., menindak lanjuti hasil evaluasi dari Kemenpan RB di tahun sebelumnya Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Koordinasi antar PD yang terkait kurang optimal
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengoptimalkan organisasi dengan PD terkait

i. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti

- Faktor pendorong indikator tersebut adalah Keinginan dari Pemkab Temanggung untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta menjadikan Aduan yang masuk sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja pemkab Temanggung
- Faktor penghambat indikator tersebut adalah Aduan yang masuk dalam Lapor Gub masih dalam proses verifikasi oleh penerima Aduan
- Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pertemuan koordinasi dengan admin SMS Gateway untuk menyamakan persepsi dalam memberikan tanggapan dan tindak lanjut terhadap aduan yang masuk. Aduan yang masuk hendaknya dianalisa untuk kemudian

digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan birokrasi

- j. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Komitmen dari Bagian Humas untuk senantiasa mendokumentasikan, serta mempublikasikan kegiatan Pimpinan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Minimnya personil dilapangan, serta ada beberapa kegiatan yang memang tidak diperkenankan untuk didokumentasikan oleh Bagian Humas. Disamping itu adakalanya kegiatan Bupati di Luar Daerah yang tidak melibatkan bagian humas
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah guna menseiasati hambatan yang ada, maka Bagian Humas mengajukan untuk ditambah personil dilapangan, dan juga mengajukan pelatihan untuk fotografi sehingga diharapkan semua staf di Bagian Humas mampu melakukan kegiatan peliputan dilapangan. untuk kegiatan luar kota Pimpinan yang tidak melibatkan bagian humas maka Bagian Humas bekerjasama dengan Ajudan Bupati untukmendapatkan dokumentasi kegiatan Bupati, karena Ajudan bupati juga melakukan kegiatan pendokumentasian.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Presentase penggunaan E procuremen terhadap belanja pengadaan
 - Faktor pendorong indikator tersebut adalah Membuat surat edaran Sekda Nomor : 050/000731 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan
 - Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pembatalan paket tender karena rasionalisasi untuk penanganan Covid-19
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat edaran Sekda Nomor: P/050/000662/

VI/2020 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sirup untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa yang masih ada dan Penyesuaian Target Kinerja akibat *refocussing* anggaran

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Sekretariat Daerah terdiri dari 9 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, Bagian PBJ, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Humas, dan Bagian Umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bagian Pemerintahan

a. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Realisasi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EKPPD)Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020

No	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peringkat	58	86	-	N/A	N/A
2	Nilai	3,2828	3,052	3,3453	N/A	N/A
3	Kategori	ST	ST	ST	N/A	N/A
4	Kepmendagri	100-53 TAHUN 2018	118-8840 TAHUN 2018	Belum ditetapkan	Belum Dinilai	Belum Dinilai
5	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	N/A	N/A

1. Cakupan Pilar Batas yang Terinventarisir

Realisasi Cakupan Pilar Batas yang Terinventarisir tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Pilar Batas yang Terinventarisir di Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pilar Batas yang Terinventarisir	0	12	32	51	61
2	Jumlah Pilar Batas	51	51	51	51	61
3	Persentase	0	23,53	62,74	100	100

m. Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu

Realisasi Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Perangkat Daerah yang Melaporkan SPM Tepat Waktu
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016– 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM Tepat Waktu	13	14	14	5	6
2	Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	15	15	15	6	6
3	Persentase	86,67	93,33	93,33	83,33	100

n. Cakupan kecamatan tertib administrasi

Realisasi Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Kecamatan yang Tertib Administrasi
di Kabupaten Temanggung Tahun 2016– 2020 TW IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kecamatan yang Tertib Administrasi	10	15	19	18	20

2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20	20
3	Persentase	50	75	95	90	100

2. Data Pokok Bagian Hukum

a. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati

Realisasi Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Realisasi Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perda yang ditindaklanjuti perbup	4	5	4	4	4
2.	Jumlah perda	11	22	12	14	25
3.	% Peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	36%	22,7%	33,3%	28,6%	16%

b. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Realisasi Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Dokumentasi Perundangan melalui JDIH Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diinput di JDIH	88	159	68	86	55
2	jumlah total Peraturan Daerah/Peraturan Bupati		161	70	100	92
3	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH		98,75%	97,14%	86%	59,78%

- c. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

Realisasi Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi
Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah permasalahan yang ditangani secara non litigasi	6	16	21	29	23
2	jumlah total permasalahan					23
3	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara nonlitigasi					100%

- d. Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi

Realisasi Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No	Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Permasalahan perkara yang diselesaikan secara litigasi	7	8	3	1	4
2	jumlah total permasalahan					4
3	presentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi					100%

3. Data Pokok Bagian Kesra

Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik

Realisasi Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3507	3533	3569	3615	3641
	- Islam	3266	3301	3346	3395	3445
	- Kristen	78	79	80	80	83
	- Katholik	18	18	18	18	16
	- Hindu	-	-	-	-	14
	- Budha	85	85	85	85	81
	- Konghuchu	-	-	-	-	2
2.	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1421	1487	1529	1546	1521
	- Islam	1708	1708	1708	1708	1517
	- Kristen	57	57	57	57	-
	- Katholik	2	2	2	2	2
	- Hindu	-	-	-	-	-
	- Budha	2	2	2	2	2
	- Konghuchu	-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	4974	5009	5054	5103	5162
4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	5329	5345	5356	5360	5800
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	93	94	94	95	89

4. Data Pokok Bagian Pembangunan

Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Realisasi Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
 Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 s/d TW II

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan	1141	964	765	650	396
2	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan	1141	963	765	650	396
3	Persentase Kegiatan yang Selesai Tepat Waktu	100	99,8	100	100	100

5. Data Pokok Bagian Perekonomian

a. Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi

Realisasi Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
 Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020 triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pupuk					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi (ton)	55.728	52.105	47.600	42.878	34.367,632
	- UREA	20.914	21.573	21.500	18.961	15.685,182
	- ZA	12.265	11.858	12.500	11.487	8.590,400
	- NPK	7.819	8.600	3.100	6.040	6.606,670
	- SP36	4.548	4.758	6.500	2.942	2.038,737
	- ORGANIK	10.182	5.316	4.000	3.448	1.416,643
	Jumlah Kebutuhan Barang bersubsidi (ton)	55.728	52.105	47.600	44.131	36.992
	- UREA	20.914	21.573	21.500	18.976	16.000
	- ZA	12.265	11.858	12.500	11.602	8.324

	- NPK	7.819	8.600	3.100	6.050	7.575
	- SP36	4.548	4.758	6.500	2.964	1.800
	- ORGANIK	10.182	5.316	4.000	4.539	3.293
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	92,90%
2	LPG 3 kg					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	20.621	20.006	20.742	21.813	23.968
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	20.621	19.429	20.350	21.468	21.813
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Premium					
	Jumlah Barang bersubsidi yang tersedia				10.290	7.032
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi				12.277	12.277
	Persentase (%)				83,8%	57,27%
4	Solar					
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia		25.344	26.928	29.784	25.872
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi		28.109	26.002	24.132	28.145
	Persentase (%)		90,2%	100%	100%	91,92 %
	Rata Rata Persentase				95,95%	85,52%

b. Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi

Realisasi Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2

Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 s.d Triwulan IV

No.	Kegiatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	4	3	5	5	4
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	4	3	5	5	4
	Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	100%	100%	100%

c. Persentase BUMD dengan Opini WTP atas Pemeriksaan KAP

Realisasi Persentase BUMD dengan Opini WTP atas Pemeriksaan KAP tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3

Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020 triwulan IV (n-1)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	4	4	4	3	2
	Jumlah BUMD	5	5	5	5	5
2	% BUMD dengan opini WTP	80%	80%	80%	60%	40 %

6. Data Pokok Bagian PBJ

a. Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu

Realisasi Persentase pengadaan barang/jasa tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1

Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa Tepat Waktu
dari tahun 2016 s.d Triwulan IV - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	jumlah paket tender yang berhasil ditenderkan	-	-	-	153 Paket	56 Paket
2.	jumlah keseluruhan paket yang dimohonkan	-	-	-	153 Paket	56 Paket
3.	Persentase penyelesaian pengadaan barang/jasa tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %

b. Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu

Realisasi Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2

Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan DRUP
Tepat Waktu dari tahun 2016 s.d Triwulan IV - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah unit kerja yang menyampaikan DRUP tepat waktu	-	-	-	96 Unit	95 Unit
2.	Jumlah keseluruhan perangkat daerah	-	-	-	103 Unit	98 Unit
3.	Persentase Tingkat penyampaian DRUP yang tepat waktu dari perangkat daerah	-	-	-	93.20%	96.94%

c. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan

Realisasi Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.3

Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan dari tahun 2016 s.d Triwulan IV - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengadaan barang jasa yang dilaksanakan lewat e proc	-	-	-	484 Paket	356 Paket
2.	Jumlah keseluruhan pengadaan barang jasa	-	-	-	1.428 Paket	1.184 Paket
3.	Presentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	-	33.89%	63.54%

7. Data Pokok Bagian Ortala

a. Indek Reformasi Birokrasi

Realisasi Indek Reformasi Birokrasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1

Penilaian Reformasi Birokrasi Kab. Temanggung Tahun 2016-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	58,45
4	2018	61,28
5	2019	62,76
6	2020*	62,76

b. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2016-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2016	75
2	2017	B

No.	TAHUN	NILAI
3	2018	75,38
4	2019	79,95
5	2020*	80,41

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Triwulan IV
Tahun 2016-2020

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2016	51,77	CC
2	2017	58,32	CC
3	2018	59,05	CC
4	2019	60,16	B
5	2020*	60,16	B

d. Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP

Realisasi Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LkjIP tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.4

Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP Tahun 2016 s.d 2020 Triwulan III

No	Uraian	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam pembuatan LKjIP	Na	31,9	27,65	58,70	58,70

8. Data Pokok Bagian Humas

- a. Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti

Realisasi Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.1

Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti tahun 2016-2020 sampai dengan Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	1.029	1.115	496	300	292
2.	Jumlah pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang masuk	1.253	1.321	534	300	295
3.	% Pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti	82	84	93	100	98,98

b. Persentase peningkatan pengunjung website

Realisasi Persentase peningkatan pengunjung website tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.2

Persentase peningkatan pengunjung website tahun 2016-2020 TW IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung website tahun n	76.018	78.374	75.906	101.603	81.682
2.	Jumlah Pengunjung Website tahun n-1	170.635	76.017	78.375	75.908	64.651
3.	% Peningkatan Jumlah Pengunjung Website	-55,45	3,10	-3,15	33,85	26,00

c. Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi

Realisasi Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.3

Persentase jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan tahun 2016 s.d 2020 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan	569	565	453	905	921
2.	Jumlah kegiatan Pemkab	596	571	461	925	946
3.	% Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasikan	95,4	98,9	98,2	97,84	97,36

9. Data Pokok Bagian Umum

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

Realisasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.1

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020 s/d TW IV

No	Uraian	Tahun	
		2019	2020
1	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi	1057	635
2	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah	1057	635
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 26 indikator terdapat 12 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Hal ini disebabkan Realisasi indikator EKPPD tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Biro Otda Provinsi Jawa Tengah atas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung (*capaian nilai masih menggunakan tahun 2018*)
 - b. Indikator Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
 - c. Indikator Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Hal ini disebabkan Lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap Perangkat Daerah serta Kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian
 - d. Indikator Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Hal ini disebabkan Ada beberapa kios pupuk bersubsidi yang belum menerapkan sistem kartu tani, HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, Beberapa kelompok tani yang belum masuk RDKK
 - e. Indikator Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Hal ini disebabkan Kurangnya pengawasan dan pengendalian BUMD serta tidak adanya/belum terisinya kelas jabatan pengevaluasi BUMD di bagian perekonomian
 - f. Indikator Cakupan perangkat daerah yang menyampaikan daftar rencana umum pengadaan tepat waktu

Hal ini disebabkan Perencanaan DRUP yang tidak matang dalam pengisian SIRUP yang berakibat pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu

- g. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Hal ini disebabkan SDM pelayanan yang masih standar, Beberapa PD tidak mengumpulkan data
- h. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Hal ini disebabkan PD belum maksimal dalam mengaplikasikan e-sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan yang dimuai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
- i. Indikator Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti
Hal ini disebabkan Terlambatnya admin dalam merespons aduan yang masuk
- j. Indikator Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi
Minimnya personil dilapangan dan keahlian di bidang fotografi, Ada beberapa kegiatan Pimpinan yang memang tidak didokumentasikan dan tidak untuk dipublikasikan, khususnya kegiatan luar kota, Tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Perangkat Daerah
- k. Presentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan
Hal ini disebabkan Masih sering terjadi eror sistem pada aplikasi yang dikelola oleh LKPP sehingga banyak tahapan metode yang harus dilakukan secara manual oleh perangkat daerah, PPK di perangkat daerah tidak mencatatkan pelaksanaan Pengadaan Langsung pada sistem SPSE
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain:
- Masih rendahnya sarana dan prasarana;
 - Belum optimalnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan aparatur
 - Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Masih rendahnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Belum optimalnya akses komunikasi dan informasi

- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*) yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan;
- Belum optimalnya koordinasi antar Bagian dan antar Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Melaksanakan *review* Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala
- Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
- Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Mengoptimalkan koordinasi antar Bagian dan antar Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

- a. Bagian Pemerintahan Penambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000 untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Camat sebesar Rp. 20.000.000, Monev AD Kelurahan sebesar Rp. 15.000.000 dan Bimtek LPPD dan LKPJ sebesar Rp. 15.000.000
- b. Bagian Hukum Kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dengan adanya Perda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Keg Penanganan Perkara secara Litigasi dan Nonlitigasi, sesuai dengan PPAS 2021. Mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 800.000.000,-

- c. Bagian Perekonomian Penambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000 karena terdapat kesalahan penulisan jumlah anggaran pada ranwal PD kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD. Serta adanya kebutuhan penambahan anggaran untuk kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Perbup tentang BUMD, kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya karena terkena *refocusing*
- d. Bagian Pembangunan Biaya sewa hotel dan perjalanan tim penyusun Perbup. Pedoman Pengelolaan APBD Tahun 2022 dan Pengadaan Laptop 1 unit (mengingat hanya ada 1 laptop yang berfungsi dengan baik) maka mengajukan penambahan sebesar Rp 35.000.000,-
- e. Bagian Umum Penambahan anggaran sebesar Rp 7.000.000 untuk Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah sebesar Rp 4.000.000 dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah sebesar Rp 3.000.000, Penambahan anggaran sebesar Rp 2.543.900.000 digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas station wagon senilai Rp 2.343.900.000 dan pengadaan sepeda motor dinas senilai Rp 200.000.000,-
- f. Bagian Organisasi Penambahan anggaran sebesar Rp 150.000.000 untuk Kegiatan Evaluasi Perda/Perbup SOTK sebesar Rp.75.000.000,-, Penyusunan Perbup akaian Dinas sebesar Rp.25.000.000,-, Fasilitasi Lomba Inovasi Pelayanan Publik dan Monev Pelayanan Publik sebesar Rp. 30.000.000,- serta penambahan anggaran pada kegiatan penyusunan LKjIP/PK dan Fasilitasi PMPRB sebesar Rp.25.000.000,-
- g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Penambahan anggaran sebesar Rp 400.000.000 digunakan untuk anggaran *medical check up* Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk penambahan sarpras pendukung kegiatan keprotokolan dan dokumentasi pimpinan
- h. Bagian Pengadaan Barang dan jasa Penambahan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian Rp. 25.500.000 untuk Kegiatan Penyempurnaan Ruang Fasilitas Publik sebagai

standar kematangan UKPBJ, Rp. 4.500.000 untuk Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Fungsional PBJ Kab. Temanggung, Rp 20.000.000 untuk Kegiatan Workshop, Diklat, Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM Bagian PBJ, Rp 20.000.000 untuk Kebutuhan Biaya Umum untuk Pengadaan Langsung yang ditangani oleh Bagian PBJ, Rp 30.000.000 untuk penambahan personil PBJ dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Kegiatan Pengelolaan PBJ yang berkaitan dengan klarifikasi tenderbelum terakomodir di anggaran, sebagaimana klarifikasi harus dilaksanakan dalam proses tender.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	SEKRETARIAT DAERAH						1	SEKRETARIAT DAERAH						
A.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						A.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. TMG	Terlaksannya forum koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	12	Bulan	90.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. TMG	Terlaksannya forum koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan koordinasi keamanan daerah	12	Bulan	90.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rupa Bumi dan terinventarisasi nya Pilar Batas di Kab Temanggung	12	Bulan	60.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Terlaksananya pembinaan Aparatur Kecamatan, Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan, Identifikasi Rupa Bumi dan terinventarisasi nya Pilar Batas di Kab Temanggung	12	Bulan	95.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersusunya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	3	Keg	85.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Tersusunya dokumen LPPD, LKPJ dan pelaporan SPM Perangkat Daerah	3	Keg	100.000.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah							Fasilitasi Kerjasama Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Terlaksannya Fasilitasi Kerjasama Daerah	12	Bulan	15.000.000		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri		Terlaksannya Fasilitasi Kerjasama Daerah	12	Bulan	15.000.000		
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	12	Bulan	100.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum	12	Bulan	100.000.000		
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	12	Bulan	750.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi	12	Bulan	1.550.000.000	pembuatan kajian legal opinion, pembayaran dg OBH untuk memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyelesaian perkara perdata dantun baik litigasi dan non litigasi	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	250.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan	12	Bulan	250.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. TMG	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggarany a kegiatan MTQ, terselenggarany a kegiatan keagamaan	3	Keg	900.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. TMG	Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan	3	Keg	900.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. TMG	Terselenggaran ya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung	1	Keg	200.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. TMG	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung	1	Keg	200.000.000		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. TMG	Terselenggaran ya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraa n Ibadah Haji dan TPHD	1	Keg	900.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. TMG	Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD	1	Keg	900.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
D.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						D.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	1	Dok	50.000.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung	1	Dok	85.000.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan	16	Keg	100.000.000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan	16	Keg	100.000.000	Biaya sewa hotel dan perjalanan tim penyusun Perbup. Pedoman Pengelolaan APBD Tahun 2022 dan Pengadaan Laptop
			Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	100	%					Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah	100	%		
			Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda	1	Keg					Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda	1	Keg		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
			Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg					Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg			
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya	30	Lap	25.000.000		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, dan Dana Lainnya	30	Lap	25.000.000		
			Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg					Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan	4	Keg			
E	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							E	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi BUMD	30	Keg	150.000		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD		Terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan dan monitoring/evaluasi BUMD	30	Keg	150.000.000		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	15	Keg	150.000.000		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Terlaksananya koordinasi kegiatan pembangunan bidang ekonomi	15	Keg	100.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Terkoordinasinya pengendalian inflasi daerah	3	Keg					Terkoordinasinya pengendalian inflasi daerah	3	Keg		
			Terlaksananya monitoring ke penerima kredit lunak dan LED	40	kelompok					Terlaksananya monitoring ke penerima kredit lunak dan LED	40	kelompok		
			Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat	4	Keg					Terlaksananya koordinasi dan monitoring Kredit Usaha Rakyat	4	Keg		
			Terlaksananya Koordinasi Program Ketahanan pangan	4	Keg					Terlaksananya Koordinasi Program Ketahanan pangan	4	Keg		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	15	Keg	100.000.000		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Produksi Daerah	15	Keg	100.000.000	
			Terkoordinasinya ketersediaan dan jaminan keamanan LPG 3 kg, pupuk dan barang subsidi lainnya	12	Bulan					Terkoordinasinya ketersediaan dan jaminan keamanan LPG 3 kg, pupuk dan barang subsidi lainnya	12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							
	Korrdinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Terkoordinasin ya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	15	Keg			Korrdinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Terkoordinasinya penggunaan dana DBHCHT sesuai peraturan	15	Keg			
F	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (PBJ)						F	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH							
										Prosentase Pengadaan Barang/Jasa yang berhasil dilaksanakan	100	%			
										Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa tepat waktu	100	%			
										Prosentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100	%			

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	200	Paket	200.000.000		Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya fasilitasi pengadaan barang dan jasa di Perangkat Daerah	12 200	Bulan Paket	300.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	12	Bulan	250.000.000		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan system pendukung		Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana sistem LPSE	12	Bulan	250.000.000	
										Terlaksananya standarisasi kematangan pengadaan barang/jasa	4	kriteria		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya pelatihan dan advokasi	103	PD	200.000.000		Peningkatan Kompetensi Pelaku Pengadaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		Terlaksananya pelatihan pelaku pengadaan, pengelola pengadaan dan pelaku usaha	103	PD	200.000.000	
										Terlaksananya fasilitasi advokasi dan manajemen resiko pelaksanaan pengadaan barang/jasa	12	Bulan		

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	PENGELOLAAN KELEMBAGAA N DAN ANALISIS JABATAN					100.000.000		PENGELOLAAN KELEMBAGAA N DAN ANALISIS JABATAN					150.000.000		
	* ABK (analisis beban kerja)		* tersedianya dokumen ABK	27	OPD			* ABK (analisis beban kerja)		* tersedianya dokumen ABK	27	OPD			
	* Standar kompetensi jabatan		* tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan (pelaksana)	27	OPD			* Standar kompetensi jabatan		* tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan (pelaksana)	27	OPD			
								*Evaluasi Perda/Perbup SOTK		* terlaksananya kegiatan evaluasi Perda/Perbup SOTK	1	dokumen			
	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA					75.000.000		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA					100.000.000		
	* pelayanan publik dan Tatalaksana		* terlaksananya kegiatan pelayanan publik dan tatalaksana	1	Dok			* pelayanan publik dan Tatalaksana		* terlaksananya kegiatan pelayanan publik dan tatalaksana	1	Dok			

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
										* terlaksananya kegiatan penyusunan perbup pakaian dinas					
	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI					75.000.000		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI					70.000.000		
	* PMPRB		* terlaksananya kegiatan PMPRB	1	Dok			* PMPRB		* terlaksananya kegiatan PMPRB	1	Dok			
								KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH					80.000.000		
	* LAKIP & PK		* tersedianya dokumen LAKIP & PK	2	Dok			* LAKIP & PK		* tersedianya dokumen LAKIP & PK	2	Dok			
H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							H	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		terlaksananya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	24	Keg			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		terlaksananya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	24	Keg	36.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	Fasilitasi Keprotokolan		terpenuhinya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya belanja penunjang operasional kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dan terselenggaranya kegiatan keprotokolan	800	keg	1.600.000.000		Fasilitasi Keprotokolan		terpenuhinya kebutuhan kedinasan kepala daerah, tersedianya belanja penunjang operasional kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dan terselenggaranya kegiatan keprotokolan	800	keg	1.662.250.000	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah, tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media	2000	data/informasi /kliping /	1.900.000.000		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Tersedianya naskah pidato dan sambutan pimpinan daerah, tersedianya informasi pimpinan daerah melalui website, media sosial, media massa, media luar ruang, serta terjalinya	2000	data/informasi /kliping /	1.955.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
			luar ruang, serta terjalinya hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru bicara pimpinan, dan tersedianya belanja perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah.							hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait dengan juru bicara pimpinan, dan tersedianya belanja perjalanan dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah.					
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto video kegiatan pimpinan daerah, tersedianya naskah press release dan fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah.	800	Dokumen/ release	500.000.000		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Tersedianya notulen rapat, dokumentasi foto video kegiatan pimpinan daerah, tersedianya naskah press release dan fasilitasi peliputan media kegiatan pimpinan daerah.	800	Dokumen/ release	996.750.000		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			12	Bulan			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			12	Bulan			

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya renstra dan renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		Tersusunnya renstra dan renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			12	Bulan			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			12	Bulan		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen evaluasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	1	Keg	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	15.072.515.664		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	14	Bulan	15.072.515.664	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25	Unit	50.000.000		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				
										Pengadaan Mesin Absen Elektronik	5	Unit	50.000.000	
										peralatan pendukung operasional Satuan Pengamanan	5	unit	29.597.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ASN, Tenaga Kebersihan, Tenaga Kemananan	70	Unit	250.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ASN, Tenaga Kebersihan, Tenaga Kemananan	410	Unit	220.403.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	Bulan	50.000.000								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	12	Bulan	200.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa	12	Bulan		
										Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	190.000.000	
										Pengadaan Pengharum Ruangan Ecocare	12	Bulan	60.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30	Unit	100.000.000								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	200.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	300.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	300.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Referensi Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	50.000.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Referensi Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	50.000.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan makanan dan minuman	12	Bulan	2.000.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu		Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan makanan dan minuman	12	Bulan	2.000.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi	12	Bulan	1.400.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi	12	Bulan	1.400.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	Unit			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8	Unit	2.343.900.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tercukupinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit	200.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pengadaan Mebel		Tercukupinya meubelair	25	Unit	200.000.000		Pengadaan Mebel		Tercukupinya meubelair	25	Unit	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	Unit	175.000.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10	Unit	175.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	50.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	15.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air	12	Bulan	1.200.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air	12	Bulan	1.200.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	160.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	160.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran,	12	Bulan	3.500.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, Jasa Pengamanan	12	Bulan	3.500.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Jasa Pengamanan Gedung Kantor, Jasa Kebersihan Kantor							Gedung Kantor, Jasa Kebersihan Kantor				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	250.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Bulan	250.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	750.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Bulan	750.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan meubelair	12	Bulan	50.000.000		Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan meubelair	12	Bulan	75.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	12	Bulan	200.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	12	Bulan	275.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	Bulan	125.000.000		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12	Bulan	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor, Rumah Jabatan serta Bangunan Lainnya	12	Bulan	300.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor, Rumah Jabatan serta Bangunan Lainnya	12	Bulan	855.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Kantor, Rumah Jabatan serta Bangunan Lainnya	12	Bulan	70.000.000								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	12	Bulan	300.000.000								

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya											
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	12	Bulan	772.680.336		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	12	Bulan	772.680.336	
	Fasilitas Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah							Fasilitas Kerumahtang gaan Sekretariat Daerah						
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati	12	Bulan	300.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati	12	Bulan	350.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Wakil Bupati	12	Bulan	216.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya Rumah Tangga Wakil Bupati	12	Bulan	314.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2022							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Terpenuhinya pembayaran iuran kepesertaan Apkasi dan Forsedasi, Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	12	bulan	2.354.000.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Terpenuhinya pembayaran iuran kepesertaan Apkasi dan Forsedasi, Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari besar nasional dan daerah	12	bulan	2.156.000.000	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang secara tidak langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, EKPPD, Pilar Batas, maupun AKIP. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui pelaporan SPM, penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah, inventarisir pilar batas dan penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja (SESUAI RENSTRA)
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

VISI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>INDIKATOR PROGRAM</i>	<i>SATUAN TARGET</i>	<i>TARGET TAHUN 2022</i>	<i>TARGET KONDISI AKHIR 2022</i>
<i>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Infomasi</i>	<i>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas</i>	<i>Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan</i>	<i>Cakupan pilar batas yang terinventarisir</i>	%	100	100
				<i>Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu</i>	%	100	100
				<i>Cakupan kecamatan tertib administrasi</i>	%	100	100
			<i>Program penyusunan dan penataan produk hukum</i>	<i>Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati</i>	%	30	30
				<i>Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH</i>	%	100	100

				<i>Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi</i>	%	83	83
				<i>Persentase permasalahan hukum yang ditangani secara litigasi</i>	%	17	17
			<i>Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental</i>	<i>Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik</i>	%	75	75
				<i>Persentase konflik masyarakat yang disebabkan agama</i>	%	0	0
				<i>Persentase status tempat ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Agama</i>	%	100	100
		<i>Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</i>	<i>Program penataan kelembagaan, tatalaksana serta peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur</i>	<i>Menurunnya tumpang tindih kelembagaan</i>	%	4,30	2,10
				<i>Persentase perangkat daerah berpredikat B dalam mengimplementasikan SAKIP</i>	%	70,20	74,50
			<i>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Setda</i>	%	100	100
		<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	<i>Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik</i>	<i>Meningkatnya nilai IKM Kabupaten</i>	%	87	89

			<i>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan kepala daerah</i>	%	100	100
			<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	<i>Persentase disiplin pegawai Setda</i>	%	0	0
			<i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>Persentase kegiatan Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai dengan protokoler</i>	%	100	100
			<i>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</i>	<i>Persentase laporan keuangan Bagian yang tepat waktu</i>	%	100	100
			<i>Program penyelenggaraan kehumasan</i>	<i>Persentase pengaduan masyarakat melalui media resmi pemda yang ditindaklanjuti</i>	%	100	100
				<i>Persentase peningkatan pengunjung website</i>	%	25	25
				<i>Persentase jumlah kegiatan pemkab yang terdokumentasi dan terpublikasi</i>	%	100	100
		<i>Terselesaikannya kegiatan pembangunan</i>	<i>Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan</i>	<i>Persentase pelaksanaan kegiatan yang selesai tepat waktu</i>	%	100	100
				<i>Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah</i>	%	100	100

				<i>Persentase dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah</i>	%	100	100
				<i>Persentase aduan layanan pengadaan yang tertangani</i>	%	100	100
				<i>Persentase paket tender yang terselesaikan</i>	%	100	100
				<i>Prosentase kegiatan yang masuk aplikasi SIRUP</i>	%	100	100
			<i>Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi</i>	%	100	100
				<i>Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi</i>	%	100	100
				<i>Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP</i>	%	100	100

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2019-2023.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2022

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	300.000.000	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250.000.000	50.000.000
	Penataan Administrasi Pemerintahan	100.000.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	60.000.000	40.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	78.000.000		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	70.000.000	8.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	110.000.000		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	105.000.000	5.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	12.000.000		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	15.000.000	-3.000.000
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.900.000.000	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.099.999.900	800.000.100
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	100.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	99.999.900	100
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.550.000.000		Fasilitasi Bantuan Hukum	750.000.000	800.000.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	250.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	250.000.000	-
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.000.000.000	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	40.875.862.500	-38.875.862.500
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	900.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.384.657.500	-484.657.500
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	200.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	38.591.205.000	-38.391.205.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	900.000.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	900.000.000	-
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	210.000.000	4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	85.000.000		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		

	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	25.000.000			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	350.000.000		5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	150.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD		
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.000.000			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	750.000.000		6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000.000		7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	150.000.000			Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		
	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	100.000.000			Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	70.000.000			Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	80.000.000					
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.650.000.000		8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36.000.000			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
	Fasilitasi Keprotokolan	1.662.250.000			Fasilitasi Keprotokolan		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.955.000.000			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	996.750.000			Pendokumentasian Tugas Pimpinan		
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.396.096.000		9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.072.515.664			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.400.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.450.000.000	-50.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.918.900.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.000.000	2.543.900.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.875.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.910.000.000	-35.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.230.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.045.000.000	185.000.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.680.336	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	772.680.336	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.820.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.870.000.000	-50.000.000

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas secara keseluruhan untuk Sekretariat Daerah dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022 sebesar Rp 4.435.750.000,-

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4	01								250,000,000							795,000,000	
4	01	02							250,000,000							795,000,000	
4	01	02	2.01						235,000,000							770,000,000	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi keamanan daerah dan Pelayanan Umum Terlaksananya rakor penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kegiatan 60 kegiatan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						550,000,000	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Optimalisasi Kinerja Kecamatan Optimalisasi Kinerja Kelurahan Pegelolaan Identifikasi Rupa Bumi Terfasilitasinya Alokasi Dana Kelurahan Verifikasi Pilar Batas di Kabupaten Temanggung		20 Kecamatan 23 Kelurahan 100 % 23 Kelurahan 10 Titik	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							100,000,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Pimpinan Daerah Tersedianya Dokumen LKPI, LPPD, RLPPD, SPM tepat waktu		1 Kegiatan 100 %	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						120,000,000	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah				15,000,000							25,000,000	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah		100 %	15,000,000							25,000,000	
TOTAL									250,000,000						795,000,000		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4	01																
4	01	02															
4	01	02	2.03														
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		99,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum		terlaksananya fasilitasi penanganan sengketa perdata dan TUN serta pengaduan di bidang hukum secara litigasi dan non litigasi				12 bulan		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			750,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		terkelolanya informasi peraturan perundang-undangan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250,000,000
									TOTAL				1,099,999,900				1,100,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4															
4	01								40,875,862,500						0
4	01	02							40,875,862,500						0
4	01	02	2.02						40,875,862,500						0
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Terlaksananya kegiatan olahraga di Lingkungan Setda, terselenggaranya kegiatan MTQ, terselenggaranya kegiatan keagamaan, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan dan bina mental		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kegiatan		1,384,657,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan dalam penyaluran bantuan hibah sarana dan prasarana tempat ibadah dan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan		38,591,205,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji dan TPHD, terselenggaranya kegiatan fasilitasi bidang kesejahteraan masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 kegiatan		900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0
									TOTAL			40,875,862,500			0

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0021 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4															
4	01								13,127,997,000						13,187,677,100
4	01	03							13,127,997,000						13,187,677,100
4	01	03	2.01						290,319,900						350,000,000
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				150,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				140,319,900		DBH CHT				100,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil				50,000,000						100,000,000
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				12,837,677,100						12,837,677,100
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				12,837,677,100						12,837,677,100
									TOTAL	13,127,997,000					13,187,677,100

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0022 Bagian Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4																	
4	01									200,000,000							245,000,000
4	01	03								200,000,000							245,000,000
4	01	03	2.02							200,000,000							245,000,000
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Tersusunnya Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APD Kabupaten temanggung		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen		75,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			85,000,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Monitoring Pelaksanaan kegiatan tahun berjalan Pemeliharaan Aplikasi Simpelbangda Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Terverifikasinya dokumen kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 100 %		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			110,000,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, DAK, Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Dana Linnya		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Kegiatan 30 laporan		25,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			50,000,000
TOTAL										200,000,000							245,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0032 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
4																
4																
4	01									275,000,000						375,000,175
4	01	01								275,000,000						375,000,175
4	01	01	2.13							275,000,000						375,000,175
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		tersedianya dokumen evaluasi jabatan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		200,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso				84,453,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		175
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso				90,547,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		175,000,000
TOTAL										275,000,000						375,000,175

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0033 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
4																			
4	01																		
4	01	01																	
4	01	01	2.11																
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan														
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan														
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
TOTAL										4,540,999,999									5,090,000,000

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0031 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
4																			
4																			
4	01																		
4	01	01																	
4	01	01	2.01																
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renstra dan Renja Sekretariat Daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,000,000	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3,000,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 12		15,072,515,664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15,223,240,820	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
4	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Tersedianya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		0 unit		79,590,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		199,996,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa sewa		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		249,997,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000,000	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya alat tulis kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220,000,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400,000,000	
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya bahan bacaan dan referensi Peraturan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		49,983,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				163,000,000	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tercukupinya fasilitas kunjungan tamu serta jamuan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2,600,000,000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0031 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tercukupinya kebutuhan konsultasi dan koordinasi		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		1,399,999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,065,000,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							374,995,352				1,500,000,000		
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Tercukupinya meubeleu		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		0 unit		199,997,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500,000,000	
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		174,998,052	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4,874,994,000				5,250,000,000		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon dan air		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		1,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,500,000,000	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor serta terbayarnya tenaga non PNS pada Jasa pelayanan perkantoran, jasa pengamanan Gedung Kantor, Jasa kebersihan kantor		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		3,499,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,500,000,000	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,229,841,200				3,300,000,000		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 157 unit		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		749,993,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0031 Bagian Umum

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya pemeliharaan meubel		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		74,945,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		274,997,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			275,000,000	
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Terpeliharanya aset tetaplainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		24,914,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan serta bangunan lainnya		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		854,990,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							772,680,336			772,680,336			
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso		12 bulan		772,680,336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			772,680,336	

4	01	01	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					2,790,403,000			3,266,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah Tangga Bupati		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	12 bulan		350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300,000,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Rumah tangga Wakil bupati		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	12 bulan		314,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	216,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan peringatan hari bear nasional dan daerah		Kab. Temanggung, Temanggung, Jampiroso	12 bulan		2,126,403,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,750,000,000
TOTAL										30,601,996,702		36,366,921,156	

Temanggung, 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SETDA
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680119 199311 1 001

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 93.03 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 71.97 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.645.393.875 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 1.185.005.821 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 43.956.096.000,- yang terdiri dari 9 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah,

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung,

2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
SETDA
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pemula Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001